|  |
| --- |
| logo UEU kecil |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2017/2018** |
| **PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH HUKUM KESEHATAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI** |
| **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** |
|  |
| **Mata Kuliah** | **:** | Hukum Kesehatan dan Pendidikan Anti Korupsi | **Kode MK** | **:** | IRM 114 |
| **Mata Kuliah Prasyarat** | **:** | - | **Bobot MK** | **:** | 2 sks |
| **Dosen Pengampu** | **:** | Siswati, A.MdPerKes, SKM,MKM | **Kode Dosen** | **:** | 5753 |
| **Alokasi Waktu** | **:** | Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online |
| **Capaian Pembelajaran** | **:** | 1. Mahasiswa mampu memahami konsep hukum kesehatan
2. Mahasiswa mampu memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan dengan memperhatikan aspek hukum rekam medis
3. Mahasiswa mampu memahami pengertian korupsi dan pencegahannya
4. Mahasiswa mampu membedakan mana tindakan korupsi dan bukan korupsi dalam menjalankan tugas pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan
5. Mahasiswa mampu mengambil keputusan mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana tindakan yang bertentangan dengan profesi

  |
|  |  |  |
| **SESI** | **KEMAMPUAN****AKHIR** | **MATERI** **PEMBELAJARAN** | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER** **PEMBELAJARAN** | **INDIKATOR****PENILAIAN** |
| 1 | 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian konsep hukum kesehatan.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum, kesehatan dan hukum kesehatan
 | Pengantar pembelajaran secara singkat. Pengertian hukum, kesehatan dan hukum kesehatan secara umum | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
2. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
3. UU RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
4. Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta 2010
 | Menjelaskan pengertian hukum, kesehatan dan hukum kesehatan secara umum dengan benar. |
| 2 | Mahasiswa mampu memahami kebijakan terkait dengan aspek hukum pelayanan kesehatan terkait dengan profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. | Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
3. Penugasan
 | 1. Undang-Undang RI No.29/2004: Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
3. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
4. Undang-Undang RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
5. PerMenKes RI No.269/2008: Rekam Medis
6. PerMenKes RI No.290/2008: Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. PerMenKes RI No.36/2012: Rahasia Kedokteran
 | 1. Mendiskripsikan pengertian kesehatan.
2. Menjelaskan pasal-pasal UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan benar
 |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum rekam medis  | Kerahasiaan isi rekam medis, persetujuan tindakan kedokteran, penyimpanan dan penyusutan rekam medis  | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. Undang-Undang RI No.29/2004: Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
3. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
4. Undang-Undang RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
5. PerMenKes RI No.269/2008: Rekam Medis
6. PerMenKes RI No.290/2008: Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. PerMenKes RI No.36/2012: Rahasia Kedokteran
 | Menjelaskan kerahasiaan isi rekam medis, persetujuan tindakan kedokteran, penyimpanan dan penyusutan rekam medis dengan benar. |
| 4 | Mahasiswa mampu memahami aspek hukum rekam medis Mahasiswa mampu memahami kebijakan pemerintah yang terkait dengan profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. | 1. Aspek hukum rekam medis
2. Permenkes RI No.269 tahun 2008 tentang rekam medis
 | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
2. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI No.29/2004: Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
5. PerMenKes RI No.269/2008: Rekam Medis
6. PerMenKes RI No.290/2008: Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. PerMenKes RI No.36/2012:
 | 1. Mendiskripsikan pengertian hukum rekam medis
2. Menjelaskan Permenkes RI No.269 tahun 2008 tentang rekam medis

dengan benar |
| 5 | Mahasiswa mampu memahami melalui paparan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan aspek hukum rekam medis dan hukum kesehatan | Kebijakan pemerintah terkait dengan aspek hukum rekam medis dan hukum kesehatan | 1. Metoda : *paparan slide hasil diskusi*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
3. Penugasan
 | 1. Undang-Undang RI No.29/2004: Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
3. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
4. Undang-Undang RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
5. PerMenKes RI No.269/2008: Rekam Medis
6. PerMenKes RI No.290/2008: Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. PerMenKes RI No.36/2012: Rahasia Kedokteran
8. Permenkes RI No.55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan Perekam Medis
 | Memaparkan slide dan menjawab pertanyaan lisan dengan benar tentang isi UU RI No.2009/2004: praktik kedokteran, UU RI No. 36/2009: kesehatan, UU RI No. 36/2014: tenaga kesehatan, UU RI No. 44/2009: rumah sakit, Permenkes RI No. 269/2008: rekam medis, Permenkes RI No 36/2013: rahasia kedokteran, Permenkes RI No. 55/2013: penyelenggaraan pekerjaan Perekam Medis  |
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian rahasia kedokteran, pemaparan informasi pasien, hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter sesuai Permenkes RI No. 36/2012 tentang rahasia kedokteran. | Permenkes RI No. 36/2012 tentang rahasia kedokteran. | 1. Metode : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, LCD, *whiteboard*, web
 | 1. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
2. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI No.29/2004: Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
5. PerMenKes RI No.269/2008: Rekam Medis
6. PerMenKes RI No.290/2008: Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. PerMenKes RI No.36/2012: Rahasia Kedokteran
8. Permenkes RI No.69/2014: hak dan kewajiban rumah sakit dan hak dan kewajiban pasien
 | Menjelaskan pengertian rahasia kedokteran, pemaparan informasi pasien, hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter sesuai isi Permenkes RI No. 36/2012 tentang rahasia kedokterandengan benar  |
| 7 | Mahasiswa mampu menjawab beberapa pertanyaan review materi 1 sampai 6 secara tertulis | Soal tertulis sebagai review materi 1 sampai 5 yang telah diberikan  | Kuis dengan 8 soal esai tulis | 1. Undang-Undang RI No.36/2009: Kesehatan
2. Undang-Undang RI No.44/2009: Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI No.29/2004: Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang RI No.36 /2014: Tenaga Kesehatan
5. PerMenKes RI No.269/2008: Rekam Medis
6. PerMenKes RI No.290/2008: Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. PerMenKes RI No.36/2012: Rahasia Kedokteran
 | Menjawab 8 pertanyaan secara tertulis dengan benar |
| 8 | Mahasiswa mampu memahami pengertian korupsi dan tujuan pendidikan anti korupsi  | Pengertian, korupsi, tindakan korupsi dan pendidikan anti korupsi  | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Nudaya Anti Korupsi
 | Menjelaskan pengertian korupsi dan tujuan pendidikan anti korupsi dengan benar dan tepat |
| 9 | Mahasiswa mampu memahami akar korupsi dan penyebab korupsi | Pengertian akar korupsi dan penyebab korupsi | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Nudaya Anti Korupsi
 | Menjelaskan pengertian akar korupsi dan penyebab korupsi dengan benar |
| 10 | Mahasiswa mampu memahami ciri-ciri dan jenis korupsi | Pengertian ciri-ciri dan jenis korupsi | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
3. Penugasan
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Nudaya Anti Korupsi
 | 1. Menjelaskan pengertian ciri-ciri dan jenis korupsi

dengan benar1. Menjawab 5 soal tulis tentang korupsi
 |
| 11 | Mahasiswa mampu memahami akibat korupsi dan dapat menghindari perbuatan dan perilaku korupsi   | Dampak masif korupsi dan perbuatan serta perilaku korupsi  | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
 | Menjelaskan akibat korupsi dan bagaimana menghindari perbuatan dan perilaku korupsi secara benar |
| 12 | Mahasiswa mampu memahami pemberantasan korupsi   | Pemberantasan korupsi   | 1. Metoda : *contextual instruction*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
 | Menjelaskan pemberantasan korupsi secara benar |
| 13 | Mahasiswa mampu memahami nilai dan prinsip anti korupsi | Nilai dan prinsip anti korupsi | 1. Metoda : *small group discussion*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Nudaya Anti Korupsi
 | Menjelaskan nilai dan prinsip anti korupsi dengan benar |
| 14 | Mahasiswa mampu membangun sikap anti korupsi di pelayanan kesehatan | Sikap anti korupsi di pelayanan kesehatan  | 1. Metoda : *small group discussion*
2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU RI No.3/1971: Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. UU RI No.8/1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. UU RI No.20/2001: Tindak pidana korupsi
4. UU RI No.7 /2006: Pengesahan atas konvensi PBB anti korupsi
5. Instruksi Presiden RI No.9/2011: Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Kemendikbud RI: Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, cetakan 1 Desember 2012
7. Pusdiklat Nakes, KemKes RI, 2014: Buku Ajar Pendidikan dan Nudaya Anti Korupsi
 | Menjelaskan pengertian sikap anti korupsi di pelayanan kesehatan dengan benar  |

**Komponen penilaian :**

1. Kehadiran = 10 %
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 35 %
4. UAS = 35 %

**Jakarta, November 2017**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,**

**Lily Widjaya, A.Md.PerKes, SKM,MM Siswati, A.Md.PerKes, SKM, MKM**